



Pranatan Anyar



Tim SAR Satlinmas Parangtritis mengedukasi wisatawan pentingnya menerapkan prokes.

KR-Sukro Riyadi

TARGET 1,47 JUTA ORANG

145.901 Nakes Divaksinasi Covid-19

JAKARTA (KR) - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, sebanyak 145.901 tenaga kesehatan (nakes) di 92 kabupaten/kota pada 34 provinsi telah divaksinasi sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19.

Menurut Nadia, secara total tercatat 172.901 nakes yang telah mengakses layanan vaksinasi Covid-19 untuk mendapatkan vaksinasi. Namun dari jumlah tersebut sebanyak 27.000 nakes batal atau ditunda vaksinasinya karena beberapa alasan, antara lain memiliki tekanan darah tinggi saat pemeriksaan kesehatan awal, merupakan penyintas Covid-19, sedang menyusui dan memiliki penyakit komorbid lain.

"Vaksinasi ini akan terus berjalan

pada seluruh tenaga kesehatan sampai akhir Februari yang ditargetkan 1,47 juta tenaga kesehatan divaksinasi," kata Nadia, Minggu (24/1).

Dijelaskan, Program Vaksinasi Covid-19 Tahap I untuk tenaga kesehatan dimulai pada 13 Januari 2021 atau telah berjalan 10 hari hingga Sabtu. Nadia berharap dengan program vaksinasi Tahap I untuk nakes ini dapat menghentikan gugurnya para nakes akibat terinfeksi Covid-19.

Nadia mengungkapkan, hingga saat ini sedikitnya 600 nakes baik perawat maupun dokter telah gugur dalam menjalankan tugasnya menangani pasien Covid-19.

Menurut Nadia, tenaga kesehatan yang tidak terdaftar pada Tahap I program vaksinasi akan mendapatkan giliran dalam Program Imunisasi Covid-19 Tahap II di bulan Februari.

Nadia menyebut saat ini alur vaksinasi untuk tenaga kesehatan tidak lagi melalui broadcast SMS dan perlu registrasi ulang lebih dulu. Setiap tenaga kesehatan yang terdaftar dalam Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan berhak mendapatkan vaksinasi Covid-19. (Sim/Ant)-f

TANGKAL PENYEBARAN COVID-19

Butuh Peran Aktif Masyarakat

BANTUL (KR) - Masyarakat diharapkan bisa jadi ujung tombak dalam mencegah penyebaran Covid-19. Sekeas apapun usaha Pemerintah, jika kesadaran masyarakat melaksanakan protokol kesehatan (prokes) rendah, semua akan sia-sia. Kebijakan Pengetatan Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) yang diperpanjang hingga 8 Februari 2021, harus mampu mengemulau penyebaran Covid-19.

Koordinator SAR Satlinmas Korwil 3 Kabupaten Bantul Ali Sutanta Jaka Saputra, Minggu (24/1) mengungkapkan, pihaknya terus berupaya memberikan edukasi kepada wisatawan di sepanjang Pantai Selatan Bantul dalam mematuhi prokes pencegahan Covid-19.

"Kami berusaha menjelaskan pentingnya melaksanakan prokes, yang tidak saja melindungi diri sendiri tetapi juga orang lain. Kesadaran setiap individu menjadi kunci utama mencegah penularan Covid-19," ujar Ali.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kabupaten Bantul Yulius Suharta mengungkapkan,

PTKM di Kabupaten Bantul sesuai Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2021, tentunya akan ada evaluasi dengan adanya perpanjangan PTKM dari Pemerintah Pusat. Pihaknya meminta masyarakat bersabar. Pemerintah sangat membutuhkan dukungan penuh masyarakat dalam mengendalikan Covid-19.

Sementara dalam Operasi Patuh Covid-19, petugas gabungan dari Satpol PP, Polres Bantul, Kodim Bantul melaksanakan penertiban dan pengawasan prokes di wilayah Kapanewon Pundong dan Kretek, Sabtu (23/1) malam, dipimpin Kabid Penegakan Perda Satpol PP Bantul Sismadi SH dan Kabid Kertertiban Umum Supriyanto S STP. Petugas masih menemukan banyak rumah makan melayani di tempat.

Karena itu, diberikan edukasi kepada pengelola untuk selalu melaksanakan prokes. Termasuk menyarankan agar makanan dibawa pulang saja untuk mencegah kerumunan. Operasi Patuh Covid-19 juga dilaksanakan di objek wisata di Kapanewon Dlingo. (Roy)-f

PENDONOR PLASMA KONVALESEN

Perlu Difasilitasi Tes PCR

YOGYA (KR) - Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudianta menyatakan, pendonor plasma konvalesen perlu difasilitasi tes PCR, agar diketahui hasil PCR telah negatif dan sudah bisa melakukan donor plasma konvalesen. Plasma konvalesen adalah plasma darah yang diambil dari pasien Covid-19 yang telah sembuh (penyintas Covid-19) dan kemudian diproses agar dapat diberikan kepada pasien yang sedang dalam masa pemulihan setelah terinfeksi.

"Jadi, donor plasma konvalesen adalah donor darah dari penyintas Covid-19 untuk membantu pasien lain yang belum sembuh dari Covid-19. Metode pengobatan ini sudah terbukti efektif untuk menyembuhkan pasien yang menderita Covid-19, sehingga donor plasma konvalesen dijadikan gerakan," katanya, Minggu (24/1).

Dengan banyaknya masyarakat

yang telah sembuh dari Covid-19, semestinya banyak juga donor yang bisa dilakukan secara sukarela untuk membantu orang lain yang masih sakit. Permasalahannya, penderita Covid-19 yang telah dirawat, gejala berkurang atau sembuh, langsung dipindahkan ke bangsal atau dipulangkan tanpa disertai tes PCR negatif atau belum.

Padahal ketentuan Permenkes menyebutkan, pasien dengan gejala ringan dan sedang tidak dilakukan tes PCR kedua langsung dipulangkan. Jika gejala berkurang dan melakukan isolasi mandiri, 10 hari kemudian bisa beraktivitas lagi. Sedangkan gejala berat yang sudah membaik juga belum tentu memiliki tes PCR negatif setelah sembuh.

"Kita sangat memahami saat ini penanganan luar biasa berat dan sulit dengan membludaknya kasus

positif, sehingga rumah sakit kewalahan. Termasuk pasien sembuh tidak dilakukan tes PCR juga sangat dipahami, karena mahal dan terbatasnya fasilitas ini," ujarnya.

Hanya saja terkait pasien sembuh, supaya memenuhi syarat dan bersedia donor plasma konvalesen, Huda meminta agar masyarakat difasilitasi tes PCR guna memudahkan melakukan donor.

Jika penyintas Covid-19 ingin donor kemudian harus mengeluarkan biaya PCR sendiri yang tidak murah tentu sangat memberatkan.

"Saya minta rumah sakit dan gugus tugas menggalakkan Gerakan Donor Plasma Konvalesen ini dengan memberikan edukasi kepada pasien bahwa donornya sangat berarti. Selain itu, penyintas yang bersedia donor plasma konvalesen juga harus difasilitasi dan memudahkan. Salah satunya dengan gratis tes PCR," urainya. (Awh)-f

PJJ Timbulkan Sikap 'Cyberbullying' bagi Anak

JAKARTA (KR) - Pembelajaran jarak jauh (PJJ) bisa menyebabkan bosan dan menimbulkan sikap *cyberbullying* bagi anak sekolah dasar (SD). Sikap ini bisa berdampak negatif. *Cyberbullying* adalah penyalahgunaan internet untuk melecehkan, mengancam, memperlakukan dan mengejek orang lain.

Hal tersebut dikemukakan Direktur Sekolah Dasar (SD) Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Dra Sri Wahyuningsih, MPd, di kantornya, Sabtu (23/1).

Diakui Sri Wahyuningsih, PJJ merupakan solusi di tengah pandemi Covid-19. Tanpa ada kontak fisik dan kerumunan orang di sekolah dan kegiatan belajar mengajar bisa tetap berlangsung. Namun, di sisi lain, belajar jarak jauh menggunakan internet, gadget dan media sosial bisa menimbulkan kebosanan.

"Selain rasa bosan, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan dampak negatif, salah satunya sikap *cyberbullying*," ujar Sri Wahyuningsih.

Untuk mencegah dampak negatif dari belajar daring ini, katanya, para guru serta orangtua untuk memahami serta memperbaiki penggunaan media sosial, sehingga menghindarkan siswa dari sikap *cyberbullying*. Kalau tidak di-manage dengan baik, belajar jarak jauh menggunakan internet rentan memicu *cyberbullying* akibat dari rasa bosan yang terjadi pada siswa.

"Dalam belajar jarak jauh, tidak hanya materi pembelajaran yang diberikan guru. Tetapi juga siswa wajib diberikan pemahaman tentang pembentukan karakter," ucapnya.

Ia berharap melalui edukasi webinar mengenai *cyberbullying* ini, para orangtua dan guru semakin memperhatikan anak-anaknya pada saat

PJJ maupun pada saat menggunakan gadget. Harapannya para orangtua harus mendampingi saat anak-anaknya tengah melakukan PJJ. Tidak hanya itu, para orangtua harus memahami serta mendampingi anak-anaknya dalam menggunakan gadget agar terhindar dari penyalahgunaan hingga menimbulkan sikap *cyberbullying*.

pembelajaran *Project Based Learning* adalah salah satu solusi alternatif yang bisa di terapkan selama PJJ. Menurutnya, *Project Based Learning* tidak saja melatih kreativitas dan inovasi pada siswa, namun secara langsung juga melatih sisi literasi, numerasi dan bahasa pada anak.

Selain itu, *Project Based Learning* melatih belajar tanah air untuk bisa berpikir kritis dan mengaplikasikan problem solving dalam pengambilan keputusan apapun yang dihadapi para siswa. Apalagi, *Project Based Learning* juga menanamkan pentingnya literasi, sebagai basis berpikir kritis tersebut. (Ati)-f

SISWA NUNGGAK SPP

Sekolah Jangan Beri Sanksi

JAKARTA (KR) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengingatkan kepada penyelenggara pendidikan jangan menjatuhkan sanksi apapun kepada siswa yang menunggak SPP di tengah pandemi Covid-19.

"Membayar SPP memang kewajiban belajar. Namun, pada situasi saat ini sangat tidak elok ketika pihak sekolah memberi sanksi siswa yang nunggak. Anak tidak boleh diancam apalagi diberi sanksi," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti, dalam rilis yang diterima KR, Minggu, (24/1).

Menurut Retno, KPAI menerima beberapa orangtua murid yang anaknya tidak bisa mengikuti pelajaran karena menunggak SPP. Laporan itu, antara lain berasal dari DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan Bali. Melarang anak didik mengikuti pelajaran karena nunggak SPP, harus

dihindari. Karena UUD 45 mengamanatkan memperoleh pendidikan adalah hak setiap warganegara.

Masalah yang diadukan terkait SPP di antaranya menyangkut permintaan keringanan besaran uang SPP mengingat semua siswa belajar dari rumah (BDR) atau dikenal dengan istilah PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh). Dasar permintaan orangtua adalah karena terdampak ekonomi akibat pandemi Covid 19.

Sementara, pengeluaran masa lalu yang berkurang karena tak ada aktivitas pembelajaran tatap muka (PTM). Selain itu, adanya "ancaman" pihak sekolah kalau tidak mencicil atau membayar tunggakan SPP, maka siswa yang tidak dapat mengikuti ujian semester akhir. Ini artinya akan meningkat pada kenaikan kelas siswa.

Ada yang ingin pindah ke sekolah negeri atau sekolah swasta yang lebih murah, namun terkendala

dokumen rapor hasil belajar dan surat pindah dari sekolah asal tidak diberikan selama SPP yang tertunggak belum dilunasi.

Padahal orangtua memang tidak mampu membayar tunggakan tersebut karena terdampak ekonomi dari pandemi Covid-19, meski diberi keringanan dan dapat dicicil.

Dengan tidak memberi dokumen dan surat pindah, berarti akan kesulitan mencari sekolah baru. Kasus terbaru yang diterima KPAI, orangtua siswa mengaku diminta pihak yayasan mengundurkan diri karena menunggak SPP sejak April 2020. Adapun besaran SPP adalah Rp 1.080.000 sampai Rp 1.250.000 per bulan.

Akibatnya, dokumen rapor dan surat pindah tidak diberikan sebelum tunggakan dilunasi, padahal pihak orangtua mengalami kesulitan ekonomi sejak masa pandemi Covid-19. (Ati)-f



KR-Mulyawan

DIGUNAKAN HARI INI: Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menunjukkan kemasan vaksin Sinovac setelah tiba di kantornya, Sabtu (23/1) sore. Sebanyak 7.600 dosis vaksin Covid-19 tersebut akan digunakan dalam Program Vaksinasi Covid-19 di Boyolali mulai Senin (25/1) hari ini. Beritanya di halaman 1:

HASILNYA BELUM SEPERTI YANG DIHARAPKAN Pemerintah Harus Evaluasi Kebijakan PPKM

JAKARTA (KR) - Epidemiolog dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat Defriman Djafri mengatakan, Pemerintah harus mengevaluasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan, karena kasus Covid-19 di Tanah Air masih terus meningkat.

"Perlu kita evaluasi. Kalau jumlah kasus naik itu jelas, dan kalau turun maka pastikan pembatasan yang akan dilakukan," katanya di Jakarta, Minggu (24/1).

Defriman Djafri mengatakan, pada dasarnya pembatasan pergerakan masyarakat seharusnya berimbang pada penurunan jumlah kasus Covid-19. Namun, kebijakan PPKM Jawa dan Bali 11-25 Januari belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Salah satu persoalannya ialah pembatasan pergerakan masyarakat tidak bisa hanya dititikberatkan pada satu atau dua pulau saja.

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unand tersebut berpendapat, seharusnya jika ingin membatasi pergerakan publik, pembatasan secara menyeluruh harus diterapkan dan tidak terkon-

sentris pada dua pulau saja. Jalan tengah yang selama ini dilakukan Pemerintah, yakni menyelamatkan aspek kesehatan dan ekonomi secara bersamaan, dinilai belum cukup efektif dalam menekan kasus Covid-19.

"Ada satu hal yang tidak bisa dibantah, yakni pergerakan atau mobilitas orang sangat berkaitan erat dengan peningkatan kasus," ujarnya.

Secara umum, jika Pemerintah hanya memberlakukan pembatasan pergerakan masyarakat di satu atau dua pulau saja, sementara wilayah lainnya tidak, kasus Covid-19 akan sulit ditekan. "Sebab orang akan tetap keluar-masuk ke daerah itu," katanya.

Lebih parah lagi, lanjutnya, saat ini banyak masyarakat sepertinya sudah tidak peduli dengan ancaman pandemi. Bahkan, tak jarang ditemukan individu yang berusaha mengalkali untuk menuju suatu daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Defriman menilai, jika kebijakan yang diambil Pemerintah tetap seperti ini, selamanya kasus Covid-19 akan terus ulur dan sulit diatasi. (Ant)-f